



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ORGANISASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRI HAPSARI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA**
3. NHK : **252970**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **3.303.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 440 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 454.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/60 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 413.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/84 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 329.000.000
6. Tanah Seluas 323 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 333.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/140 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 281.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 263.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **254.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000



3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 330.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 896.752.223

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.784.252.223

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.784.252.223

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.